

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2019  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KAB. SAROLANGUN

JALAN AMAL rt6 rw 9 NO. 70 KOMPLEK PU TLP  
(0745) 91691

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPKP Kab. Sarolangun disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah DPKP Kabupaten Sarolangun yaitu :

*“MEWUJUDKAN DPKP SEBAGAI SKPD YANG RESPONSIF DAN ANTISIPATIF TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA”*

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Sarolangun dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun

Sarolangun, Januari 2020

KEPALA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

dto

H. HENRIMAN, S. Sos  
NIP. 19670621 198512 1 001

# Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	
i DAFTAR ISI .....	
iii DAFTAR TABEL .....	
iv DAFTAR DIAGRAM .....	
vi	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Isu Strategis .....	4
D. Landasan Hukum .....	5
E. Sistematika .....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
A. Perencanaan strategis .....	7
1. Visi .....	8
2. Misi .....	9
3. Tujuan dan sasaran .....	9
B. Indikator Kinerja Utama .....	13
C. Perjanjian Kinerja 2014 .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	18
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis ...	20
C. Akuntabilitas Keuangan .....	34
D. Prestasi dan Penghargaan .....	38
BAB IV PENUTUP .....	40

!!!

## Daftar Tabel

### Halaman

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Pemadam Kebakaran San Penyelamatan Tahun 2017-2022 Sebelum dan Setelah Reviu.....	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun.....	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun.....	15
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 2018 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019 .....	19
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2022.....	20
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.....	22
Tabel 3.4	Pencapaian target Sasaran tahun 2019.....	22
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	23
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 : Meningkatkan pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019 .....	24
Tabel 3.7	Tabel Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran di Kewilayahan Tahun 2019.	
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahun 2019 .....	26
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019.....	27
Tabel 3.10	Jumlah Kejadian Kebakaran di Kab. Sarolangun Tahun 2019 .....	28

Tabel 3.11 Rata-rata <i>response time</i> kebakaran di Kab. Sarolangun Tahun 2019 .....	29
Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 3: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 .....	29
Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 .....	30
Tabel 3.14 Hasil Evaluasi AKIP DPPK Kab. Sarolangun Tahun 2018 .....	32
Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun .....	35
Tabel 3.17 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan .....	36
Tabel 3.18 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2017-2018 .....	37

# Daftar Diagram

Diagram	Uraian	Halaman
Diagram 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	20

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kab. Sarolangun, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Sarolangun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Sarolangun Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kab. Sarolangun Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang.

pencegahan dan penanggulangan kebakaran, secara struktural Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kab, Sarolangun bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun melalui Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- b. Melaksanakan tugas teknis operasional bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional pemadaman dan rescue, pengadaan sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengembangan serta administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris, membawahi  
:
  - a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kebakaran
  - a. Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiap Siagaan

- b. Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Kebakaran
- 3. Kepala Bidang Rehabilitasi, Pelatihan Dan Sarana Teknis.
  - a. Kepala Seksi Penyuluhan, Pembinaan, Pelatihan & Sarana Teknis
  - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

### C. Isu Strategis

Berdasarkan pelaksanaan program setiap tahun serta persepsi masyarakat, tokoh dan pakar, maka dapat disusun kelompok masalah dan makna strategisnya seperti pada uraian berikut :

- a. Keterbatasan sarana prasarana, Pos Wilayah dan Kendaraan unit pemadam Kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;
- b. Kondisi kemacetan lalu lintas;
- c. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;
- d. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang;
- e. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant, sungai dll untuk pemadaman;
- f. Pentingnya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran;
- g. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta dukungan anggaran.
- h. Pentingnya Kompensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

Permasalahan dalam jangka menengah diarahkan untuk dapat ditangani pada RPJMD Tahun 2017 – 2022, sedangkan permasalahan jangka panjang diarahkan dalam RPJPD.

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Rencana Strategis/RPJMD ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Kurangnya sarana prasarana melalui pembangunan pos pemadam kebakaran serta pengadaan kendaraan unit tangki, pancar dan *rescue*;
2. Lemahnya pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan relawan kebakaran;
4. Kurangnya kerjasama dengan para pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran khususnya di wilayah Kabupaten Sarolangun;
5. Minimnya kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja.

#### D. Landasan Hukum

LAKIP Kab. Sarolangun ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kab. Sarolangun Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2017-2022.

E. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPK Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Iku dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Nomor 03/441-DPPK Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kab. Sarolangun Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kab. Sarolangun dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kab. Sarolangun yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, **“Sarolangun Lebih Sejahtera”**.

Visi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 adalah :

*“MEWUJUDKAN DPKP SEBAGAI SKPD YANG RESPONSIF DAN ANTISIPATIF TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN BENCANALAINYA”*

## 2. Misi

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran
- b. Terwujudnya waktu tanggap darurat (Response Time) dalam wilayah manajemen kebakaran (WMK)
- c. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi DPKP Kab. Sarolangun Tahun 2017-2022 sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis.

Hasil revidi pada rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil revidi selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2017-2022.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan revidi Rencana strategis Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Sarolangun

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
- Melakukan perubahan redaksional dari beberapa indikator yang masih berorientasi output

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Penambahan beberapa indikator
- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun sebagai berikut :



Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kebakaran Kab. Sarolangun Tahun 2017- 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya pada tahap dini	Meningkatnya Pelayanan Publik yang baik dan kemandirian masyarakat secara Profesional dalam pencegahan Terjadinya bahaya kebakaran	-' Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten
2	Terwujudnya waktu tanggap darurat 15 menit dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya dalam WMK	Meningkatnya waktu tanggap darurat 15 menit dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya dalam WMK	'- Respon Time Rate 15 Menit
3	Terwujudnya Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam setiap Wilayah Ibu Kota Kecamatan	Meningkatnya Layanan Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten	'- Wilayah Manajemen Kebakaran
4	Terwujudnya Tingkat Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Layanan Damkar oleh Masyarakat	'- Indeks Kepuasan Masyarakat IKM

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. DPKP Kab. Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Nomor :

800/ 03 -DPKP/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Tahun 2017-2022, berdasarkan hasil Reviu

IKU

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun sebanyak 4 (empat) Indikator. sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten	$\frac{\text{Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$
2	Respon Time Rate 15 Menit	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$
3	Wilayah Manajemen Kebakaran	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran / 10000 jumlah penduduk
4	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	Survei dan Wawancara, Permenpan 16/2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

### C. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dan Perubahannya serta hasil reuiu. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Program  
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Thn 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase Administrasi Perkantoran	%	75	91
2	Mendorong Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2. Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	80	99
3	Mendorong Motivasi Kerja Aparatur	3. Persentase Tingkat Pemenuhan Pakaian Dinas	%	95	99
4	Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	4. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur)	%	75	100
5	Mendorong Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Dan Aset	5. Persentase Laporan DPKP	%	85	100

6	Mendorong Peningkatan Dan Pengembangan Informasi Damkar Melalui Sarana Promosi Daerah	6	Persentase Promosi DPKP	%	85	100
7	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemadam	7.	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	90	37

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut

:

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPKP Kab. Sarolangun Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama DPKP Kab Sarolangun hasil reviu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas tentang IKU Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kab. Sarolangun yang menetapkan 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai

berikut :

➤ Sasaran 1	terdiri dari	1 indikator
➤ Sasaran 2	terdiri dari	1 indikator
➤ Sasaran 3	terdiri dari	1 indikator
➤ Sasaran 4	terdiri dari	1 indikator

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kab. Sarolangun Nomor : 800/003-DPPK/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Tahun 2017-2022, Dalam rangka Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemadam

Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Sarolangun tahun 2019.

sebagai tahun pertama renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Tahun 2019 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			Renstra (2019)		Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten	%	8	6	60	8	80	1 Pos per Kecamatan
2	Respon Time Rate 15 Menit	%	8	6	60	8	80	Wilayah Respon time
3	Wilayah Manajemen Kebakaran	Unit	8	6	60	8	80	1 Mobil/ Kecamatan
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80	n/a	n/a	80	n/a	belum dilakukan pengukuran
Rata-Rata Capaian IKU					45 %		72 %	

*Keterangan : 1 (satu) sasaran belum dilaksanakan karna pada tahun 2019 Kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi sehingga sasaran ini belum dapat dilaksanakan*

Rata-rata Capaian IKU DPKP pada tahun 2019 sebesar 45%, terdapat 1 indikator yang tidak tersedia data (belum dilakukan pengukuran, akan dilakukan pengukuran pada tahun 2020. Pada indikator lain, capaian kinerja belum sesuai Target yang di tunjukan 3 (Tiga ) indikator yaitu Cakupan pelayanan bencana Respon Time, Wilayah Manajemen Kebakaran dengan capaian kinerja 60%

Terdapat 1 (satu) indikator tidak tersedia data dan belum dilakukan pengukuran kinerja yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja,

Tahun 2019 adalah tahun Ke 2 (Dua) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun  
2017-2018

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1	Persentase Administrasi Perkantoran	%	1.362.981.000	1.310.107.050	96 %	1.480.471.000	1.352.498.626	91%

2	Sasaran 2 : Meningkatnya waktu tanggap darurat 15 menit	2	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur	%	1.923.967.840	1.854.672.720	96%	1.628.884.000	1.539.844.500	95%
---	--	---	--	---	---------------	---------------	-----	---------------	---------------	-----

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten	3	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	%	100.754.000	91.448.000	90	100.750.000	100.674.200	100%
4		4	Persentase Tingkat Pemenuhan Pakaian Dinas	%	136.350.000	136.350.000	100%	118.500.000	117100.000	100%
5		5	Persentase Laporan DPKP	%	16.652.500	16.652.500	100%	15.000.000	15.000.000	100%
6		6	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah	%	30.000.000	29.800.000	100%	30.000.000	30.000.000	100%
7	Sasaran 4 : Meningkatnya Kepuasan Layanan Damkar oleh Masyarakat	7	Persentase peningkatan Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	117.181.000	48.110.000	41 %	236.230.000	88.040.000	37%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kab. Sarolangun Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	Nihil
2	Sesuai Target	83%
3	Tidak Mencapai Target	27%

*Keterangan : 1 (satu) sasaran tidak dapat terlaksana sepenuhnya di karenakan Musim Karhutla Jadi Sibuk dilapangan Memadamkan Api.*

Dari 4 (Empat) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang diperjanjikan sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Pencapaian target Sasaran tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
3	Sasaran 1	1	-	-	1	100	-	-
4	Sasaran 2	1	-	-	-	-	1	95
5	Sasaran 3	4	-	-	4	100	-	-
6	Sasaran 4	1	-	-	-	-	1	37
	Jumlah	7	-	-	5	40	2	40

*Keterangan : 1 (satu) sasaran tidak dapat terlaksana sepenuhnya di karenakan Musim Karhutla Jadi Sibuk dilapangan Memadamkan Api.*

Dari 4 (Empat) sasaran dengan 7 (enam) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A	Sasaran 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	1	100 %
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B	Sasaran 2		

1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	1	95 %
C	Sasaran 3		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	4	100 %
3	Tidak Mencapai Target	-	-
D	Sasaran 4		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	1	37 %

*Keterangan : 1 (satu) indikator sasaran tidak terlaksana Sepenuhnya*

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja jangka panjang dengan kinerja jangka menengah.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja SKPD (Dinas Kebakaran) lain dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2019 serta sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun tahun 2017-2022, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana Pada Masyarakat  
dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi	Tahun 2019	%	Target	%
----	-----------	--------	---------	------------	---	--------	---

	Kinerja		Tahun 2018	Target	Realisasi		Tahun 2022	
1	Persentase Kelurahan/Desa Siaga Kebakaran dan Bencana Lainnya	%	57	67	67	100%	149	44%

Sasaran meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat diukur oleh 1 (satu) indikator yang diperjanjikan yaitu Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 44% atau tidak mencapai target. Adapun realisasi tingkat capaian indikator kinerja belum tercapai sesuai target, karena terbatasnya kuantitas dari tenaga penyuluh kebakaran di lapangan serta masih terbatasnya pendanaan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada daerah/wilayah rawan kebakaran dan bencana lainnya. Adapun sarana dan prasarana pendukung dimaksud diantaranya adalah penyediaan tandon air, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pos pembantu serta sarana pendukung lain, dan yang paling utama adalah upaya meningkatkan pemahaman anggota Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) terhadap penanggulangan dini kebakaran dan bencana lainnya.

Faktor yang dapat mendorong tercapainya indikator tersebut diantaranya adalah meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan teknis/bintek atau pembinaan dan penyuluhan kebakaran kepada warga masyarakat khususnya relawan kebakaran yang terdapat di Kelurahan, karena merekalah yang akan menjadi mitra terdepan dalam upaya penanggulangan dini ketika terjadi kebakaran dan melakukan kegiatan yang bersifat mitigasi kebakran dan bencana lainnya.

Tabel 3.7  
Tabel Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran di  
Kewilayahan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Peserta	Ket
1	Kecamatan Sarolangun	50 orang satwankar beserta warga	Triwulan I
2	Kecamatan Singkut	20 orang satwankar beserta warga	Triwulan II
3	Kecamatan Mandi Angin	20 orang satwankar beserta warga	Triwulan III
4	Kecamatan CNG	20 orang satwankar beserta warga	Triwulan III
5	Kecamatan Pelawan	50 orang Satwankar beserta warga	Triwulan IV

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Meningkatnya Pelayanan Publik yang baik dan kemandirian masyarakat secara Profesional dalam pencegahan Terjadinya bahaya kebakaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target	%	
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya	%	22,99	60.98	60.98	100	91,96	65

Sasaran mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif diukur oleh 1 (satu) indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dan bencana lainnya. Jika melihat dari hasil capaian kinerja tahun 2019 untuk indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran tercapai 100% (Sesuai Target), namun jika dibandingkan dengan rencana capaian indikator kinerja pada tahun 2022 (akhir RPJMD) masih terdapat kesenjangan/gap sebesar 65%.

Adapun faktor pendorong atas ketercapaian indikator tersebut diantaranya adalah adanya Penempatan Pos-Pos di Kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin, Singkut, Cermin Nan Gedang Dan sebagai calon lokasi pembangunan Pos Wilayah Kebakaran Sarolangun. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atas Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota dengan target sebesar 80% dan 75% harus dicapai pada tahun 2015. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal). Upaya yang

dilakukan untuk mengejar target yang belum tercapai adalah dengan dimulainya rencana penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) untuk rencana pembangunan Pos Wilayah Kebakaran untuk Sarolangun Wilayah Utara atau Sarolangun Wilayah Barat.

Tabel 3.9  
 Analisis Pencapaian Sasaran 2  
 Meningkatnya waktu tanggap darurat 15 menit dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya dalam WMK dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		%	Tahun 2022 Target	%
				Target	Realisasi			
1	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	Menit	22	20	15	75	15	100

Sasaran mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya 15 menit diukur oleh 1 (satu) indikator tingkat waktu tanggap (*response time rate*). Jika melihat dari hasil capaian kinerja tahun 2019 untuk indikator kinerja Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) tercapai 75% (Sesuai Target), jika dibandingkan dengan terget akhir rencana strategis (Renstra) maka capaian sebesar 100 %.

Adapun rumus untuk mengetahui persentase rencana tingkat capaian adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Artinya semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik.

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta bangunan di Kab. Sarolangun yang kian hari kian meningkat, yang disertai dengan masih banyaknya permasalahan kota khususnya dalam hal urusan perumahan, maka upaya upaya dalam mencapai keberhasilan pada indikator kinerja dimaksud adalah dengan memperpendek daya jangkau/radius mobil pemadam kebakaran atau menambah jumlah pos pemadam kebakaran di wilayah rawan kebakaran. Salah satu faktor penghambat keberhasilan pencapaian indikator yang dapat kami sampaikan diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran.

Tabel 3.10  
Jumlah Kejadian Kebakaran di Kab. Sarolangun Tahun 201

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Areal Terbakar (m <sup>2</sup> )	Taksiran Kerugian (Rp)	Ket
1	JANUARI	5			
2	FEBRUARI	5			
3	MARET	6			
4	APRIL	4			
5	MEI	6			
6	JUNI	8			
7	JULI	2			
8	AGUSTUS	4			
9	SEPTEMBER	2			
10	OKTOBER	3			
11	NOPEMBER	3			
12	DESEMBER				
JUMLAH		154			

Sumber : Bidang Pemadaman DPKP Kab. Sarolangun.

Tabel 3.11  
Rata-rata *response time* kebakaran di Kab. Sarolangun Tahun 2019

No	Triwulan	Jumlah Kejadian		
1	I	11		13,25"
2	II	6		15,54"
3	III	54		16,37"
4	IV	83		15,86"
Rata-rata		154		15,26"

Sumber : Bidang Pemadaman DPKP Kab. Sarolangun (data diolah)

Tabel 3.12  
Analisis Pencapaian Sasaran 3  
Meningkatnya Layanan Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022

o	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2018	Tahun 2019		%	Target Tahun 2022	%
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Layanan Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten	Angka	57	67	67	100	149	4.59

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terdapat data pendukung yang kuat (n/a), sehingga tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2018 dan baru pada tahun 2019 akan dilakukan pengukuran. Metode pengukuran yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan survei kepuasan masyarakat dan wawancara/*interview*, khususnya kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran dan kepada warga masyarakat yang tidak terkena dampak dari penyebaran api akibat terjadinya insiden kebakaran.

Tabel 3.13  
Analisis Pencapaian Sasaran 4  
Meningkatnya Kepuasan Layanan Damkar oleh Masyarakat dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2022

					Tahun
--	--	--	--	--	-------

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018		%	2022	
				Target	Realisasi		Target	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	Angka	n/a	60	59,10	98,50	77	76,75
Rata-Rata Capaian Kinerja				80	79,55	99,25	88,5	88,37

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Sarolangun DPA Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun dengan total nilai belanja keseluruhan adalah sebesar Rp. 5.435.384.214,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.910.265.803,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dengan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 525.119.000 ,-

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16  
Pagu dan Realisasi Anggaran DPKP Kab.  
Sarolangun Tahun 2019

URAIAN	PAGU	REALISASI	
		RP	Persentase
BELANJA LANGSUNG	3.609.835.000,-	3.243.165.326,-	90 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.825.607.142,-	1.667.100.477,-	109 %

Jumlah Program : 7 Program  
Jumlah Kegiatan : 35 Kegiatan

PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR %	CAPAIAN INDIKATOR (%)
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,480,471,000	1,352,498,626	91 %	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	94%	91 %

PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR %	CAPAIAN INDIKATOR (%)
---------	------	-----------	------------	-----------	--------------------	-----------------------

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.628.884.000	1.539.844.500	95 %	Persentase Sarana dan prasarana aparatur pendukung kinerja aparatur yang terpenuhi	78%	78%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	118,500,000,-	117,100,000,-	99%	Persentase Kedisiplinan Aparatur	93%	99 %

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,750,000,-	100,674,200	100%	Persentase jumlah aparatur yang bersertifikat	95%	100 %
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000,-	15,000,000,-	100%	Persentase jumlah aparatur yang bersertifikat	82 %	100 %
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah	30,000,000,-	30,000,000,-	100 %	Persentase Tumbuh Kembangkan daya saing daerah	75 %	100 %
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	236,230,000,-	88,048,000,-	37 %	Persentase Rspn Time kebakaran, Kebakaran dan Penyelamatan yang ditangani, Kendaraan Operasional pemadam yang memadai, dan RW yang memadai.	85 %	37%

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	masalah	Solusi
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	4.800.000,-	96 %	NIHIL	NIHIL
2. Penyediaan Komunikasi Sumberdaya air dan listerik	65.500.000	36.121.918,-	55 %	NIHIL	NIHIL
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	124.471.000,-	118.471.000,-	95%	NIHIL	NIHIL
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8,000,000,-	8,000,000,-	100 %	NIHIL	NIHIL
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.000.000	38.000.000	100 %	NIHIL	NIHIL
6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaa	. 14.250.000	. 14.250.000	100 %	NIHIL	NIHIL

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	MASALAH	SOLUSI
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.250.000	17.250.000	100 %	MASALAH	NIHIL
8. Penyediaan Makanan dan Minuman	300,000,000,-	264,500.000,-	88 %	NIHIL	NIHIL
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	91,000,000,-	90,000,000,-	100%	NIHIL	NIHIL
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	80,000,000,-	78,400,000,-	98 %	NIHIL	NIHIL
11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	732.000.000,-	677.000.000,-	95 %	NIHIL	NIHIL

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	MASALAH	SOLUSI
----------	------	-----------	------------	---------	--------

12. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	5,000,000,-	4,750,000,-	95 %	NIHIL	NIHIL
13. Pembangunan Gedung Kantor	135,000,000,-	130,844,500,-	97 %	NIHIL	NIHIL
14. Pengadaan Kendaraan Dinas	457,000,000,-	450,699,000,-	99 %	NIHIL	NIHIL
15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	159,000,000,-	150,789,000,-	95 %	NIHIL	NIHIL
16. Pengadaan Meubeler	35.500.000,-	35.358.000,-	100 %	NIHIL	NIHIL
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.500.000,-	35.500.000,-	100 %	NIHIL	NIHIL
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	431,000,000,-	395,672,900,-	92 %	NIHIL	NIHIL
19. Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor	40,000,000,-	39,500,000,-	99 %	NIHIL	NIHIL

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE	MASALAH	SOLUSI
20. Pemeliharaan Rutin berkala Komputer	10,000,000,-	10,000,000,-	100 %	NIHIL	NIHIL
21 Penyedia Jasa Asuransi Kesehatan dan Asuransi	5,384,000,-	3,693,000,-	69 %	NIHIL	NIHIL
22. Pengadaan Jaringan Komputer/Internet	10,000,000,-	-	-	-	Jaringan Internet Suda Terpasang di tahun sebelumnya
23. Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10,000,000,-	9,990,000,-	100 %	NIHIL	100 %
24. Pengadaan Peralatan Damkar	327,000,000,-	304,480,000,-	93 %	NIHIL	NIHIL

25. Pembangunan Website Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Sarolangun	9,000,000,-	9,000,000,-	100 %	NIHIL	NIHIL
26. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	118,000,000,-	117,100,000,-	99 %	NIHIL	NIHIL
27. Pendidikan dan Pelatihan Formal	76,750,000,-	76,674,200,-	100 %	NIHIL	NIHIL
28. Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan bagi anggota yang baru	24,000,000,-	24,000,000,-	100 %	NIHIL	NIHIL
29. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000,-	15,000,000,-	100 %	NIHIL	NIHIL

30. Pawai Pembangunan	15,000,000,-	15,000,000,-	100%	NIHIL	NIHIL
31. Pameran Pembangunan	15,000,000,-	15,000,000,-	100%	NIHIL	NIHIL
32 Fasilitas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran	17,000,000,-	-	-	NIHIL	NIHIL
33. Peringatan Upacara Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran	48,110,000,-	48,110,000	100 %	NIHIL	NIHIL
34. Sosialisasi Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	111,120,000,-	-	-	NIHIL	NIHIL
35. Fasilitas UPT Pos Damkar	60,000,000,-	39,948,000	67 %	NIHIL	NIHIL

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten sarolangun, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

#### D. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Sebelum Menjadi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Sewaktu Masih Bergabung Dengan Dinas TataKota yang sekarang Menjadi Dinas Perkim telah Turut Serta Membawah Kabupaten memperoleh penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil Terbersih yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia

#### Daftar Prestasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun.

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Penghargaan Kota Kecil Terbersih Adipura	Piagam	2012
2	Penghargaan Kota Kecil Terbersih Adipura	Piagam	2013
2	Penghargaan Kota Kecil Terbersih Adipura	Piagam	2014
4	Penghargaan Sakip Dinas	Piagam	2019

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2018. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun menetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun 2017-2022 menetapkan sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan kedua pada tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Tahun 2019.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 5.435.384.214,- secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Sarolangun adalah 90 % dari anggaran indikatif renstra yang direncanakan sebesar Rp. 5.435.384.214,- hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kab. Sarolangun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2020

KEPALA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

dto

H. HENRIMAN, S. Sos  
NIP. 19670621 198512 1 001

